KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGNEDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN KENDARI

MEMORANDUM
NOMOR B.171/SKIPM.KDI/TU.140/V/2026

Yth.	: Sekretaris BPPMHKP
Dari	: Plt. Stasiun KIPM Kendari
Hal	: Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2026
Lampiran	: 1 (satu) Berkas
Tanggal	: 4 Mei 2026

Sehubungan dengan berakhirnya periode Triwulan I Tahun Anggaran 2026 serta dalam rangka memenuhi akuntabilitas organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi, bersama ini kami sampaikan:

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Kendari Triwulan I Tahun Anggaran 2026 yang memuat capaian indikator kinerja, realisasi anggaran, analisis kendala, serta rencana tindak lanjut.
2. Dokumen tersebut telah disesuaikan dengan data realisasi pada aplikasi KINERJAKU.

Sebagai bahan laporan, dokumen fisik dan softcopy (terlampir) diserahkan untuk dapat ditelaah lebih lanjut sebagai bahan evaluasi kinerja.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Stasiun KIPM Kendari,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Kasrida

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

SPPMHKP
KENDARI

TRIWULAN I

2026
LAPORAN KINERJA

STASIUN PPMHKP KENDARI

Jalan Wolter Monginsidi No. 82 A Ronmeeto, Kendari

www.kkp.go.id | sppmhkp kendari

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kendari (LKj SPPMHKP Kendari) Triwulan I Tahun 2026 dapat diselesaikan.

LKj SPPMHKP Kendari Triwulan I Tahun 2026 disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian kinerja terkait program dan kegiatan SPPMHKP Kendari selama Triwulan I, baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Untuk mewujudkan unit kerja yang akuntabel, indikator-indikator kinerja disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Sebagaimana dalam Triwulan I tahun 2026, perhitungan capaian target kinerja sejak triwulan I sudah menggunakan target kinerja yang baru.

Semoga LKj SPPMHKP Kendari Triwulan I Tahun 2026 ini dapat menjadi menjadi sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja SPPMHKP Kendari, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan untuk peningkatan kinerja SPPMHKP Kendari di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Kendari, 10 April 2026
Plt. Kepala SPPMHKP Kendari,

Kasrida, S.St.Pi., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
DAFTAR TABEL 3
DAFTAR GAMBAR 4
IKHTISAR EKSEKUTIF 5
BAB I PENDAHULUAN 6
1.1 LATAR BELAKANG 6
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 7
1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 10
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA 12
2.1 CAPAIAN KINERJA 12
2.2 ANALISIS DAN EVALUASI 15
BAB III PENUTUP 33
LAMPIRAN 34

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sasaran Strategis dan Target Indikator Kinerja SPPMHKP Kendari 11
Tabel 2. 1 Capaian Kinerja SPPMHKP Kendari Triwulan I Tahun 2026 13
Tabel 2. 2 Target dan Realisasi Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari 18
Tabel 2. 3 Target dan Realisasi Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari 22
Tabel 2. 4 Target dan Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Kendari..... 25
Tabel 2. 5 Target dan Realisasi Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kendari 28
Tabel 2. 6 Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup 31
Tabel 2. 7 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada Triwulan I Tahun 2026... 31
Tabel 2. 8 Penyerapan Anggaran per Jenis Kegiatan pada Triwulan I Tahun 2026 32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Stasiun PPMHKP Kendari 9
Gambar 1. 2 Komposisi SDM Organisasi Stasiun PPMHKP Kendari Tahun 2026 .. 10
Gambar 2. 1 Dashboard Capaian IKU dan IK Triwulan I Tahun 2026..... 12
Gambar 2. 2 Raport Kinerja Stasiun PPMHKP Kendari per Triwulan selama tahun 2026 13

IKHTISAR EKSEKUTIF

Nilai kinerja IKU dan IK Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kendari pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 112,74% (Istimewa). Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja SPPMHKP Kendari yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

A. Dari 11 Indikator Kinerja Kegiatan, terdapat 5 Indikator Kinerja Kegiatan (112,74%) yang pencapaiannya memenuhi atau melebihi target, dan tidak terdapat yang pencapaiannya kurang dari target.
B. Uraian dari 5 IKU dan 3 Sasaran sebagai berikut:
    1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari terealisasi 74% dari target 72% atau 102,78%;
    2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari terealisasi 100% dari target 72% atau 120%;
    3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari terealisasi 100% dari target 86% atau 116,28%;
    4. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari terealisasi 100% dari target 77% atau 120%;
    5. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun PPMHKP Kendari terealisasi 3,71 dari target 3,50 atau 106%;

Realisasi penyerapan anggaran Stasiun PPMHKP Kendari sampai Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp. 873.047.159 atau mencapai 21,65% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4.032.282.000. Pagu anggaran SPPMHKP Kendari tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan, pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar dan Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Kendari.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKj atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKj tahunan berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

1. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
3. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

LKj Triwulan I Tahun 2026 SPPMHKP Kendari disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SPPMHKP Kendari dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Triwulan I Tahun 2026 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja serta sarana

untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja SPPMHKP Kendari. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka mencapai visi, misi, fungsi, tujuan, serta sasaran strategis, SPPMHKP Kendari perlu didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada SPPMHKP Kendari secara efektif dan efisien. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

1. Kedudukan, tugas dan fungsi SPPMHKP Kendari:

   Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. Nomor 28/Permen-Kp/2025 tanggal 31 Desember 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2023 perubahan atas Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2017 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan SPPMHKP Kendari merupakan unit pelaksana teknis (UPT) atau bagian dari unit kerja mandiri di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPPMHKP.

   Wilayah Kerja Berkedudukan di Kendari dengan wilayah kerja yang mencakup titik-titik strategis keluar-masuknya komoditas perikanan di Sulawesi Tenggara, seperti pelabuhan perikanan, bandara, dan pusat pengolahan.

   Tugas utama SPPMHKP Kendari adalah melaksanakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta penerapan sistem manajemen mutu di wilayah kerjanya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk perikanan yang beredar, baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor, memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, SPPMHKP Kendari menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

a) Sertifikasi Mutu

   Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, dan audit dalam rangka penerbitan sertifikat kesehatan (Health Certificate) untuk ekspor maupun domestik.

b) Surveilans dan Monitoring

   Melakukan pemantauan secara berkala terhadap residu, kontaminan, dan penyakit ikan pada unit pengolahan ikan (UPI) dan sarana distribusi.

c) Pengujian Laboratorium

   Penyelenggaraan pengujian organoleptik, mikrobiologi, dan kimiawi terhadap sampel hasil perikanan guna memastikan kesesuaian dengan standar (SNI atau standar negara tujuan)

d) Pengawasan Penerapan HACCP

   Memastikan pelaku usaha perikanan menerapkan prinsip Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) secara konsisten.

e) Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran hasil perikanan yang tidak sesuai standar atau mengandung bahan berbahaya (seperti formalin atau boraks)

f) Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, dan keuangan internal satuan pelayanan.

2. Organisasi

Oleh karena itu, SPPMHKP Kendari kini berfokus penuh pada "Mutu dan Keamanan" (Quality Assurance). Hal ini bertujuan agar pengawasan mutu hasil perikanan Indonesia lebih spesifik, profesional, dan diakui secara internasional (Global Trust).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Stasiun PPMHKP Kendari, Kepala Stasiun dibantu oleh Jabatan Fungsional, diantaranya Inspektur Mutu Hasil Perikanan, Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, Pranta Keuangan APBN dan Jabatan Fungsional Umum lainnya.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung saat ini berjumlah 12 orang pegawai, dengan komposisi pegawai PNS 10 orang laki-laki dan 2 orang perempuan serta PPPK 7 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Komposisi pegawai yang berimbang

dari segi jabatan, golongan, pendidikan dan kompetensi merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja dalam perspektif learning and growth.

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Stasiun PPMHKP Kendari

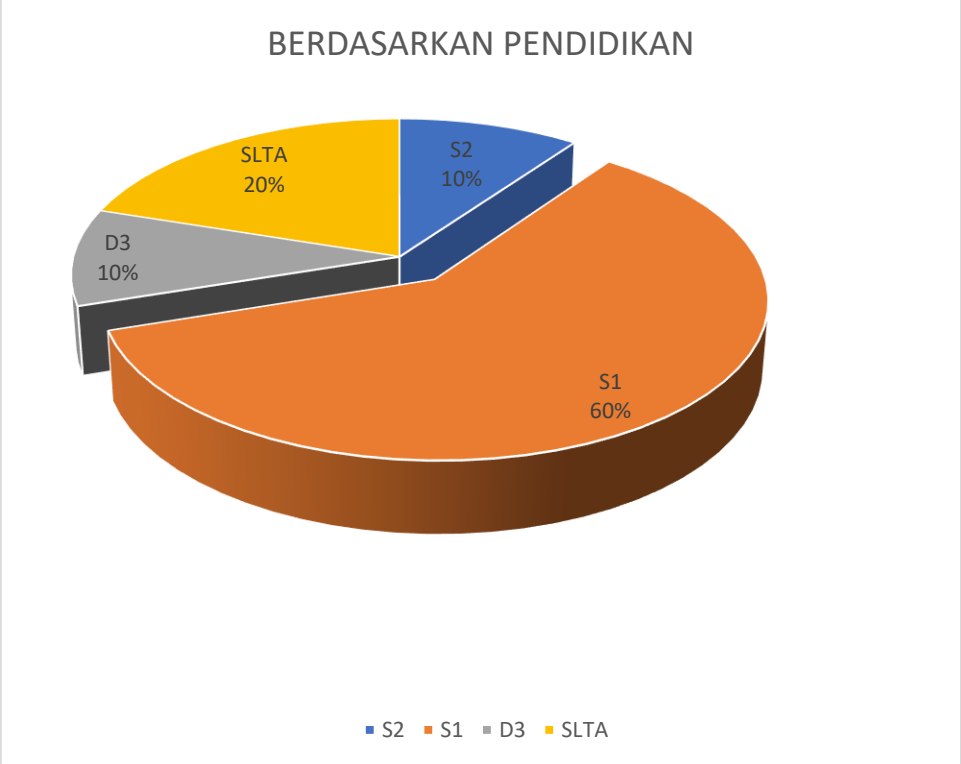

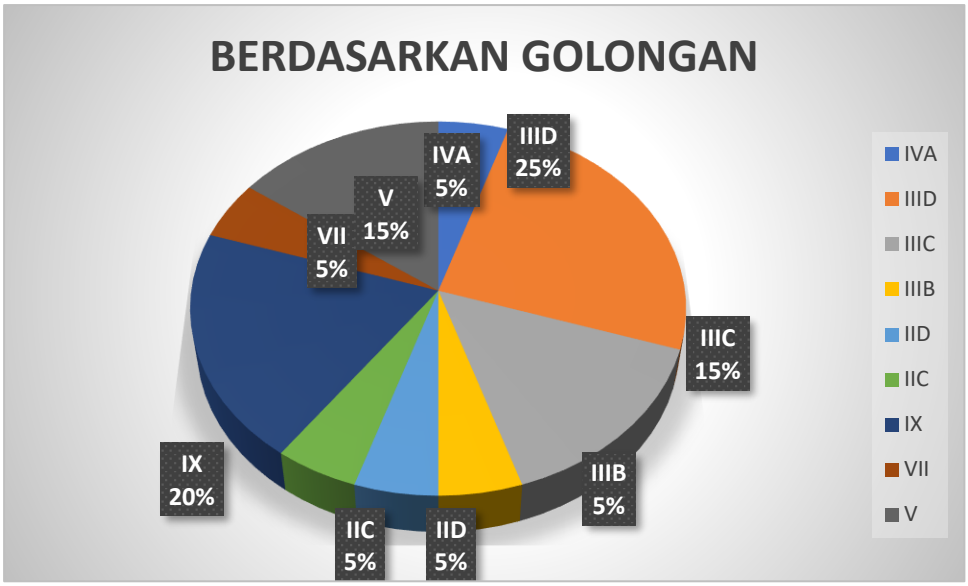

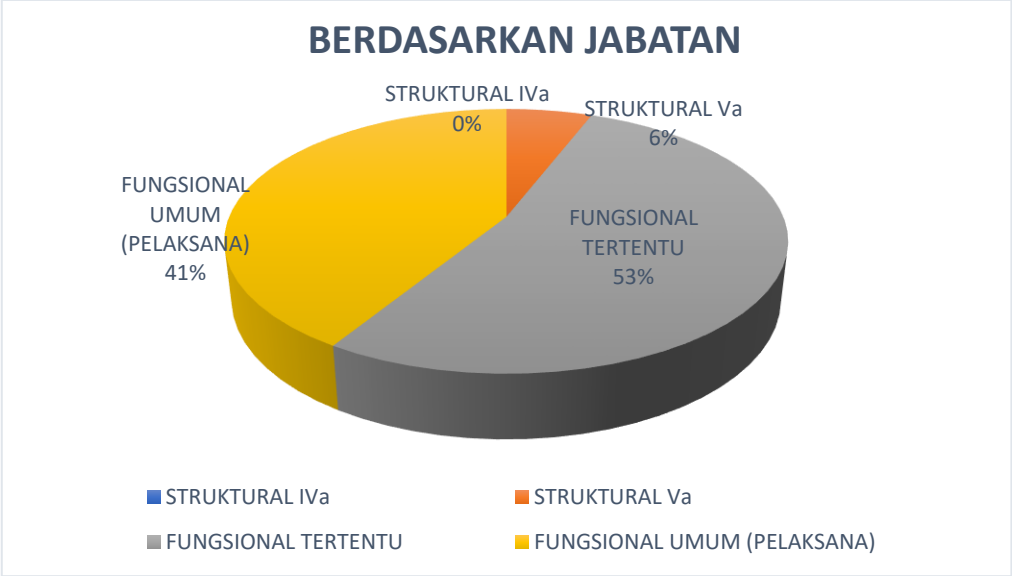

Gambar 1. 2 Komposisi SDM Organisasi Stasiun PPMHKP Kendari Tahun 2026

1.3. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Tabel 1. 1 Sasaran Strategis dan Target Indikator Kinerja SPPMHKP Kendari

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
			2026	TRIWULAN I
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (%)	72	74
	2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (%)	72	87,22
Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (%)	71	0
Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Kendari	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (Indeks)	82,5	0
	5.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kendari (Nilai)	77	0
	6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (Nilai)	86,2	0
	7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (Persen)	86	100
	8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (Nilai)	92,1	0
	9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (Nilai)	71,75	0
	10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (%)	77	100
	11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (Indeks)	3,5	3,71

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja antara Plt. Kepala SPPMHKP Kendari dengan Kepala BPPMHKP yang ditandatangani pada tanggal 5 Januari 2026, dilakukan pengukuran capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi berdasarkan Indikator Kinerja. Untuk Indikator Kinerja Kegiatan yang capaiannya diukur secara tahunan diperhitungkan sesuai dengan karakteristik Indikator Kinerja Kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan pengukuran kinerja pada SPPMHKP Kendari, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja secara online yaitu melalui website www.kinerjaku.kkp.go.id.

Proses penghitungan kinerja menggunakan pedoman Manual IKU yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan- kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggung jawabnya.

Capaian kinerja SPPMHKP Kendari pada Triwulan I 2026 sudah baik, hal ini ditandai dengan Nilai Capaian Kinerja IKU sebesar 112,74% seperti pada gambar Dashboard Aplikasi Kinerjaku berikut ini.

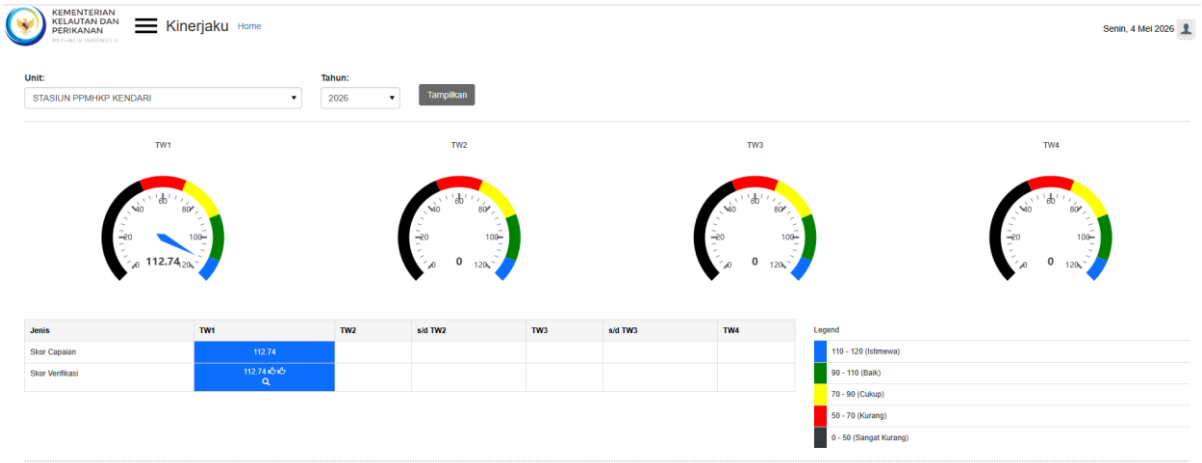

Gambar 2. 1 Dashboard Capaian IKU dan IK Triwulan I Tahun 2026

Berikut ini ditampilkan Raport Kinerja Stasiun PPMHKP Kendari per Triwulan selama tahun 2026 sebagaimana gambar 2.2 berikut :

LAPORAN CAPAIAN KINERJA
BULAN MARET

TAHUN ANGGARAN 2026
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA STASIUN PPMHKP KENDARI
NKO 112.74%

Kode		Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2026	Target MARET	Capaian MARET	%	Target s/d MARET	Capaian s/d MARET	%	Tgl Input
SK.01		Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan						111,39			111,39		
	IKSK.1	Persentase Hasil Kelautan dan PerikananSektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari Data Dukung1 Data Dukung2	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	72	72	74	102,78	72	74	102,78	14/04/2026 10:56
	IKSK.2	Persentase Hasil Kelautan dan PerikananSektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari Data Dukung1 Data Dukung2 Data Dukung3	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	72	72	87,22	120	72	87,22	120	14/04/2026 10:56
SK.02		Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang dilakukan sesuai standar											
	IKSK.02.1	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71	0			0	0		14/04/2026 10:56
SK.03		Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Kendari						114,09			114,09		
	IKSK.03.1	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,5	0			0	0		14/04/2026 10:56
	IKSK.03.2	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77	0			0	0		14/04/2026 10:56
	IKSK.03.3	Nilai Pemiliaan Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86,2	0			0	0		14/04/2026 10:56
	IKSK.03.4	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari Data Dukung1 Data Dukung2	%	Maximize	Rata-rata	86	86	100	116,28	86	100	116,28	14/04/2026 10:56
	IKSK.03.5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,1	0			0	0		14/04/2026 10:56
	IKSK.03.6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,75	0			0	0		14/04/2026 10:56
	IKSK.03.7	Persentase rencana umum pengadaan (RUP) yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari Data Dukung1 Data Dukung2	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77	77	100	120	77	100	120	14/04/2026 10:56
	IKSK.03.8	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari Data Dukung1 Data Dukung2 Data Dukung3	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3,5	3,5	3,71	106	3,5	3,71	106	14/04/2026 10:56

Gambar 2. 2 Raport Kinerja Stasiun PPMHKP Kendari per Triwulan selama tahun 2026

Secara rinci capaian Indikator Kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis SPPMHKP Kendari pada Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Capaian Kinerja SPPMHKP Kendari Triwulan I Tahun 2026

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2026	TRIWULAN I		
				T	R	%
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (%)	72	72	74	102,78
	2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan	72	72	87,22	120

		Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (%)				
Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Kendari	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (%)	71	0	0	0
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (Indeks)	82,5	0	0	0
	5.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kendari (Nilai)	77	0	0	0
	6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (Nilai)	86,2	0	0	0
	7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (Persen)	86	100	100	116,28
	8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (Nilai)	92,1	0	0	0
	9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (Nilai)	71,75	0	0	0
	10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (%)	77	77	100	120
	11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (Indeks)	3,5	3,5	3,71	106

2.2 ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detail menurut indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Seluruh produk perikanan, baik yang dikonsumsi dalam negeri maupun untuk ekspor, memiliki mutu yang baik dan aman untuk dikonsumsi. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sistem pengendalian yang efektif terhadap kualitas hasil kelautan dan perikanan sejak dari produksi, pengolahan, hingga distribusi. Tujuannya adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat, meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global, serta mendukung kepatuhan terhadap standar nasional dan internasional. Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi sebagai upaya pembinaan bagi pelaku usaha agar menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan dan pengolahan yang higienis secara konsisten..

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Cara Pengukuran:

CARA PENGUKURAN

$$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} X100\%$$

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer
E = Persentase Unit Usaha menerapakan CPIB Kapal yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Kendari
F = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB
A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB
B = Persentase Unit menerapkan CPIB
C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB
D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB
xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Hasil Pengukuran =

No	Satuan Kerja	Target (%)	TE CBIB	TE CPIB	TE CDOIB-CPOIB	TE CPPIB	TE CPIB Kapal	Realisasi IKU UPT	% Capaian IKU UPT
39	Stasiun PPMHKP Kendari	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	90,00	74,00	102,78%

$$\%X = \frac{TE\ CBIB+TE\ CPIB+\ TE\ CDOIB-CPIOB+\ TE\ CPPIB+TE\ CPIB\ Kapal}{5}\ x\ 100\%$$

$$\%X = \frac{70+70+70+70+90}{5}\ x\ 100\%$$

$$\%X = 74{,}00\ \%\ \text{atau}\ 102{,}78\ \%$$

Pada Triwulan I tahun 2026 Stasiun PPMHKP Kendari hanya melakukan sertifikasi terhadap (1) satu jenis sertifikasi yaitu :

a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik Diatas Kapal;

1. 10 (sepuluh) sertifikasi

Output dari kegiatan ini terdiri dari :

a. Sertifikat CPIB Diatas Kapal

Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp.31.000.000,- yang digunakan untuk :

a. 10 Sertifikasi CPIB Diatas kapal untuk TW.I

b. Dialog Sertifikasi CPIB Kapal

Realisasi anggaran sampai dengan TW I Tahun 2026 sebesar 6.700.000

Pada Triwulan I tahun 2026, Stasiun PPMHKP Kendari telah berhasil melaksanakan sertifikasi terhadap 10 (sepuluh) unit kapal untuk mendapatkan Sertifikat CPIB Diatas Kapal.

Target sertifikasi sebanyak 10 dokumen telah terpenuhi 100% sesuai dengan perencanaan output triwulanan.

Keberhasilan ini didorong oleh pelaksanaan Dialog Sertifikasi CPIB Kapal yang efektif, sehingga meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku usaha (pemilik kapal) dalam memenuhi standar teknis yang dipersyaratkan.

Meskipun target fisik tercapai, tantangan utama terletak pada sinkronisasi jadwal inspeksi dengan keberadaan kapal di pelabuhan. Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan memperkuat koordinasi melalui grup komunikasi daring dengan nahkoda/pemilik kapal untuk memastikan jadwal on-site yang presisi.

Penggunaan anggaran pada Triwulan I menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat tinggi.

Analisis Anggaran: Dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp31.000.000, realisasi anggaran hingga akhir TW I hanya sebesar Rp6.700.000 (sekitar 21,6%).

Dengan realisasi 21,6% anggaran, satuan kerja mampu menghasilkan 100% target fisik triwulanan (10 sertifikat).

Efisiensi ini terjadi karena optimalisasi biaya perjalanan dinas melalui penggabungan jadwal inspeksi beberapa kapal dalam satu kali waktu kunjungan ke

lokasi, serta penggunaan media digital dalam tahapan sosialisasi sebelum dialog tatap muka dilakukan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya, direkomendasikan beberapa langkah strategis:

1. Memaksimalkan penggunaan aplikasi atau sistem informasi untuk tracking masa berlaku sertifikat kapal-kapal di wilayah Kendari, agar proses resertifikasi dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis.
2. Melanjutkan program dialog secara berkelanjutan tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga pada bimbingan teknis pemeliharaan sarana di atas kapal pasca-sertifikasi.
3. Melakukan tinjauan ulang terhadap sisa pagu anggaran agar dapat dialokasikan pada percepatan target sertifikasi di Triwulan II atau untuk kegiatan pengawasan mutu yang lebih intensif guna memastikan konsistensi penerapan CPIB.

Untuk perbandingan target dan capaian realisasi setiap triwulan serta Renstra 2024-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Target dan Realisasi Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari

Realisasi Tahun 2025		Tahun 2026							Renstra 2025-2029		
TW I	2025	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2025	Target PK 2026	% Realisasi thd Target PK	Target 2025	Target 2026	% Capaian thd Target
0	0	100	72	74	102,78	0	72	102,78	70	72	102,78

2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

a. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
b. Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.
c. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada: a. Standar Nasional Indonesia (SNI); b. Standar Internasional (Codex Alimentarius); c. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
d. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

CARA PENGUKURAN

$$X = \frac{A+B+C}{xn} X100\%$$

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Kendari
A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk yang menarapkan manajemen keamanan diatas standar
B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP diatas standar
C = Persentase surat keterangan penerapan HACCP yang diterbitkan pada unit distribusi ikan dan/atau supplier
xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Hasil Pengukuran :

- Persentase Sertifikasi HACCP :

A = 99,17 %

- Persentase Sertifikasi SKP

B = 100 %

- Persentase Sertifikasi PDI

C = 62,50 %

- Sehingga, Jumlah Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yg memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (%X), sebesar :

$$\%X = \frac{A+B+C}{Xn} x\ 100\%$$

$$\%X = \frac{99{,}17 + 100 + 6\ {,}50}{3} x\ 100\%$$

%X = **87,22%**

Pada Triwulan I tahun 2026 Stasiun PPMHKP Kendari telah melakukan sertifikasi terhadap 2 jenis sertifikasi yaitu :

a. Sertifikat HACCP
b. Sertifikat SKP

Output dari kegiatan ini terdiri dari :

a. 4 Sertifikasi HACCP dari 2 Unit Pengolahan Ikan yaitu : PT. Jala Crabindo International dengan jenis produk Pasteurized Crab Meat (tanggal inspeksi 4 Februari 2026), dan PT. Kendari Bay Seafood dengan jenis produk Frozen Chephalapods, Frozen Demersal Fish, dan Frozen Slipper Lobster Meat (tanggal inspeksi 19 Februari 2026).
b. 4 Sertifikat SKP dari 1 Unit Pengolahan Ikan yaitu : PT. Kendari Bay Seafood dengan jenis produk Frozen Chephalapods, Frozen Demersal Fish, Frozen Pelagic Fish, dan Frozen Slipper Lobster Meat (tanggal inspeksi 28 Januari 2026).

Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran kegiatan SKP sebesar Rp. 15.508.000, dengan realisasi sebesar Rp. 640.000 (4,13%), kegiatan HACCP sebesar Rp.18.580.000 dengan realisasi sebesar Rp. 8.320.000 atau 44,78%, dan kegiatan SPDI sebesar Rp. 8.701.000,- namun belum ada realisasi.

Untuk kegiatan Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI), Stasiun PPMHKP telah melakukan identifikasi dan pendampingan langsung kepada pelaku usaha distribusi Ikan pada tanggal 12 Maret 2026 yakni terhadap Koperasi Desa Merah

Putih (KDMP) Sorue Jaya Kab. Konawe, Koperasi Cahaya Alam Bokori dan PT. Golden Marindo. Namun demikian, untuk pelaksanakan sertifikasi belum dapat terealisasi karena kedua pelaku usaha tersebut belum mengikuti sosialisasi Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) dan belum memiliki surat keterangan/rekomendasi hasil penilaian CDIB dari Dirjen PDSPKP.

Secara umum, kinerja sertifikasi pada sektor Unit Pengolahan Ikan (UPI) menunjukkan hasil yang sangat positif, namun terdapat tantangan pada sektor distribusi.

Target fisik untuk Sertifikasi HACCP dan SKP telah terpenuhi dengan baik. Telah diterbitkan 4 Sertifikat HACCP untuk PT. Jala Crabindo International dan PT. Kendari Bay Seafood, serta 4 Sertifikat SKP untuk PT. Kendari Bay Seafood. Hal ini menunjukkan kepatuhan unit pengolahan di wilayah Kendari terhadap standar mutu internasional tetap tinggi.

Capaian PDI belum maksimal karena belum ada sertifikat yang terbit pada TW I. Meski identifikasi dan pendampingan lapangan telah dilakukan pada 12 Maret 2026 terhadap Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Cahaya Alam Bokori, dan PT. Golden Marindo, proses sertifikasi terkendala syarat administratif pusat.

Pelaku usaha distribusi belum mengikuti sosialisasi Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) secara formal dan belum memperoleh rekomendasi hasil penilaian dari Dirjen PDSPKP.

Petugas telah melakukan pendampingan langsung (jemput bola) untuk memastikan kesiapan sarana prasarana pelaku usaha sembari mengarahkan mereka untuk segera mendaftar sosialisasi resmi.

Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I menunjukkan pemanfaatan sumber daya yang sangat efisien, terutama pada kegiatan SKP dan PDI.

Sertifikasi SKP: Mencapai realisasi fisik 100% dengan penggunaan anggaran hanya Rp640.000 (4,13%) dari pagu Rp15.508.000. Hal ini tercapai melalui optimalisasi koordinasi mandiri oleh pelaku usaha dan integrasi jadwal inspeksi.

Sertifikasi HACCP: Menggunakan anggaran sebesar Rp8.320.000 (44,78%). Penyerapan ini lebih tinggi karena melibatkan proses audit yang lebih intensif dan teknis pada dua perusahaan besar.

Kegiatan SPDI/PDI: Anggaran sebesar Rp8.701.000 belum terealisasi (0%), namun output identifikasi tetap berjalan menggunakan sumber daya internal yang ada, sehingga meminimalkan pengeluaran biaya operasional di awal tahun.

Untuk meningkatkan capaian IKU dari 87,22% menuju target yang lebih tinggi pada triwulan berikutnya, langkah-langkah berikut akan diambil:

1. Segera berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal PDSPKP untuk memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi CDIB bagi pelaku usaha yang telah diidentifikasi (Koperasi Desa Merah Putih, dkk) agar rekomendasi penilaian segera terbit.
2. Meningkatkan frekuensi bimbingan teknis pra-sertifikasi untuk memastikan saat tim penilai pusat turun, pelaku usaha sudah 100% siap secara dokumen maupun fasilitas.
3. Mengintegrasikan jadwal inspeksi rutin dengan layanan sertifikasi baru untuk terus menjaga efisiensi anggaran namun tetap meningkatkan jumlah jangkauan unit usaha yang tersertifikasi.

Untuk perbandingan target dan capaian realisasi setiap triwulan serta Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Target dan Realisasi Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari

Realisasi Tahun 2025		Tahun 2026							Renstra 2025-2029		
TW I	2025	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2024	Target PK 2026	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	Target 2026	% Capaian thd Target
100	120	100	72	87,22	120	0	72	87,22	70	72	120

2. Sasaran Kegiatan

Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Kendari

Memperkuat kapasitas kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Melalui sasaran ini, diharapkan tercipta sistem pengawasan mutu yang adaptif terhadap perkembangan industri, berbasis teknologi informasi, dan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, menyederhanakan prosedur birokrasi, mempercepat layanan sertifikasi mutu, serta memperkuat sinergi lintas sektor untuk menjamin mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan. Dengan demikian, dapat lebih responsif terhadap dinamika global, mempercepat waktu

respons terhadap masalah mutu, serta meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar nasional maupun internasional, sekaligus mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Kendari

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit Eselon I lingkup KKP sampai dengan waktu pengukuran.

Formula Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \text{ X } 100\%$$

Pada Triwulan I tahun 2026 Stasiun PPMHKP Kendari rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) 100%.

Output dari kegiatan ini terdiri dari:

rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) 100%.

Untuk melaksanakan kegiatan ini sumber dana disesuaikan dengan kebutuhan karena masih terdapat blokir efisiensi anggaran kebijakan pemerintah pusat.

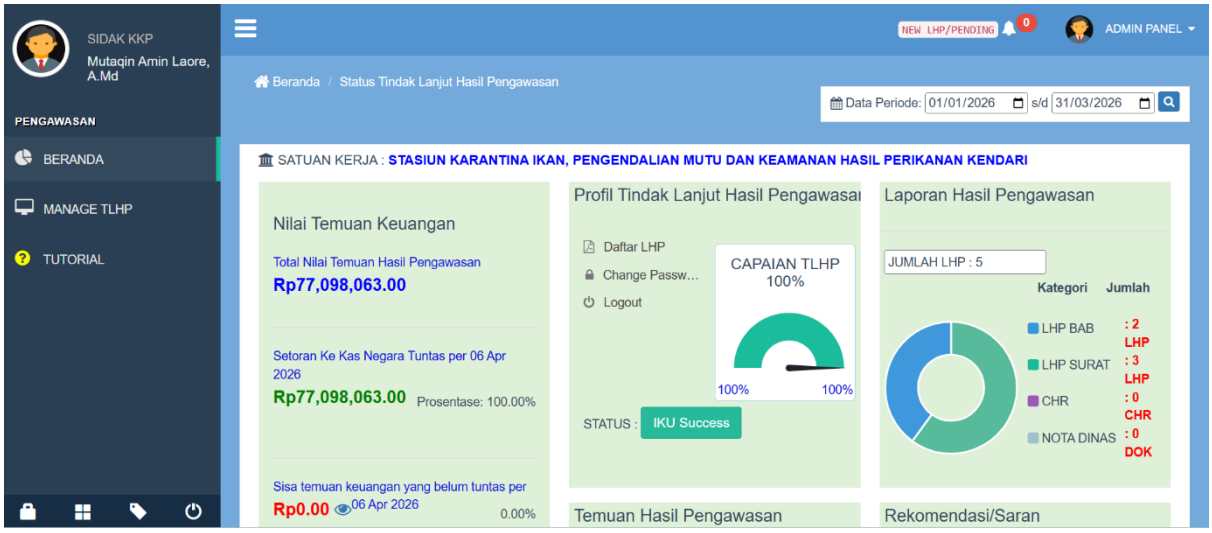

Target Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun PPMHKP PPMHKP Kendari adalah 86%. Realisasi Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kendari pada Triwulan I adalah 100% atau sebesar 120%.

Pada Triwulan I Tahun 2026, Indikator Kinerja Utama (IKU) tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen) di Stasiun PPMHKP Kendari menunjukkan kinerja yang sangat baik. Seluruh rekomendasi hasil pengawasan Itjen telah ditindaklanjuti secara tuntas dengan status tindak lanjut TUNTAS, sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

Keberhasilan pencapaian ini menunjukkan komitmen Stasiun PPMHKP Kendari dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), penguatan sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak terdapat rekomendasi yang tertunda maupun yang belum ditindaklanjuti, sehingga tidak terjadi penurunan kinerja dibandingkan periode sebelumnya.

Kondisi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat tidak menjadi hambatan signifikan dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, karena kegiatan lebih menitikberatkan pada perbaikan administrasi, penguatan prosedur, serta koordinasi internal.

Sebagai langkah antisipatif, Stasiun PPMHKP Kendari telah menerapkan mekanisme pengendalian dan pemantauan internal untuk memastikan setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Itjen pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya, khususnya dalam kondisi keterbatasan anggaran. Efisiensi tersebut dicapai melalui:

1. Pemanfaatan sumber daya internal secara optimal tanpa memerlukan tambahan biaya yang signifikan.
2. Penggunaan anggaran berbasis kebutuhan riil, disesuaikan dengan karakter rekomendasi yang bersifat administratif dan penguatan sistem.
3. Koordinasi dan komunikasi internal yang efektif, sehingga proses tindak lanjut dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

Dengan pendekatan tersebut, seluruh rekomendasi dapat dituntaskan dengan capaian maksimal tanpa membebani anggaran, sejalan dengan kebijakan efisiensi pemerintah pusat.

Untuk menjaga keberlanjutan capaian kinerja dan mencegah terulangnya temuan serupa di masa mendatang, Stasiun PPMHKP Kendari telah dan akan melakukan beberapa upaya perbaikan, antara lain:

1. Memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui peningkatan kepatuhan terhadap prosedur dan standar operasional.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan.
3. Meningkatkan koordinasi antar unit kerja, khususnya dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan.
4. Membangun budaya kepatuhan dan akuntabilitas, agar rekomendasi pengawasan dapat dicegah sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Dengan upaya tersebut, diharapkan Stasiun PPMHKP Kendari dapat mempertahankan capaian kinerja IKU tindak lanjut rekomendasi pengawasan Itjen pada level optimal serta mendukung peningkatan kualitas tata kelola organisasi secara berkelanjutan.

Untuk perbandingan target dan capaian realisasi setiap triwulan serta Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 4 Target dan Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Kendari

Realisasi Tahun 2025		**Tahun 2026**							**Renstra 2025-2029**		
TW I	2025	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW IV	Target PK 2026	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	Target 2026	% Capaian thd Target
100	100	100	86	100	120	-	86	100	100	100	100

2. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari

   Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan

secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya..

Pengukuran:

Formula Perhitungan :

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP = Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Pada Triwulan I tahun 2026 Stasiun PPMHKP Kendari Rekapitulasi Rencana Umum PBJ Terumumkan adalah 100%.

Output dari kegiatan ini terdiri dari:

Rekapitulasi Rencana Umum PBJ Terumumkan adalah 100%.

Untuk melaksanakan kegiatan ini sumber dana disesuaikan dengan kebutuhan karena masih terdapat blokir efisiensi anggaran kebijakan pemerintah pusat.

per 5 April 2026

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN			STATISTIK MONER			SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
						PAGU PENGADAAN					
			RUP Penyedia	RUP Swakelola	TOTAL	Program 1 (Kode EC)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL			
13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN		302,420,559,000	2,450,699,000	304,871,258,000	251,458,196,000	53,413,062,000	304,871,258,000			
1	427598	BALAI BESAR KIPM DAN KHP MAKASSAR	19,484,769,000	-	19,484,769,000	18,337,432,000	1,147,337,000	19,484,769,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	567610	BALAI KIPM DAN KHP BALIKPAPAN	1,143,921,000	-	1,143,921,000	66,030,000	1,077,891,000	1,143,921,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	649615	BALAI KIPM DAN KHP LAMPUNG	1,029,385,000	-	1,029,385,000	116,390,000	912,995,000	1,029,385,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	649750	BALAI KIPM DAN KHP AMBON	1,339,462,000	-	1,339,462,000	202,420,000	1,137,042,000	1,339,462,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	649593	BALAI KIPM DAN KHP BANJARMASIN	1,057,310,000	-	1,057,310,000	103,661,000	953,649,000	1,057,310,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
6	427624	BALAI KIPM DAN KHP DENPASAR	2,030,406,000	-	2,030,406,000	257,799,000	1,772,607,000	2,030,406,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	649568	BALAI KIPM DAN KHP ENTIKONG	526,628,000	-	526,628,000	20,206,000	506,422,000	526,628,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	649682	BALAI KIPM DAN KHP JAKARTA II	2,027,441,000	-	2,027,441,000	297,229,000	1,730,212,000	2,027,441,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	567812	BALAI KIPM DAN KHP JAYAPURA	942,893,000	-	942,893,000	99,338,000	843,555,000	942,893,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	567631	BALAI KIPM DAN KHP MANADO	1,141,041,000	-	1,141,041,000	182,579,000	958,462,000	1,141,041,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	567758	BALAI KIPM DAN KHP MATARAM	922,433,000	-	922,433,000	140,919,000	781,514,000	922,433,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	427567	BALAI KIPM DAN KHP MEDAN I	1,053,502,000	-	1,053,502,000	281,989,000	771,513,000	1,053,502,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	649661	BALAI KIPM DAN KHP SEMARANG	1,436,067,000	-	1,436,067,000	192,966,000	1,243,101,000	1,436,067,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	427542	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA I	2,120,230,000	-	2,120,230,000	671,429,000	1,448,801,000	2,120,230,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	649788	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA II	909,530,000	2,380,979,000	3,290,509,000	571,040,000	2,719,469,000	3,290,509,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	649640	BALAI KIPM DAN KHP TJ. PINANG	388,074,000	-	388,074,000	57,590,000	330,484,000	388,074,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
17	649572	BALAI KIPM DAN KHP TARAKAN	872,480,000	-	872,480,000	-	872,480,000	872,480,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
18	662897	BALAI UJI STANDAR KIPM DAN KHP	23,387,383,000	-	23,387,383,000	21,945,200,000	1,442,183,000	23,387,383,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
19	440807	SEKRETARIAT BPPMKHP	222,620,591,000	-	222,620,591,000	205,416,732,000	17,203,859,000	222,620,591,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
20	567694	STASIUN KIPM DAN KHP KENDARI	228,306,000	-	228,306,000	95,000,000	133,306,000	228,306,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
21	645691	STASIUN KIPM DAN KHP MAMUJU	132,060,000	-	132,060,000	10,000,000	122,060,000	132,060,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
22	649711	STASIUN KIPM DAN KHP SORONG	264,756,000	-	264,756,000	25,000,000	239,756,000	264,756,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
23	649589	STASIUN KIPM DAN KHP ACEH	1,094,470,000	-	1,094,470,000	114,470,000	980,000,000	1,094,470,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
24	645693	STASIUN KIPM DAN KHP BANDUNG	753,105,000	-	753,105,000	98,696,000	654,409,000	753,105,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
25	427649	STASIUN KIPM DAN KHP BATAM	683,227,000	-	683,227,000	93,630,000	589,597,000	683,227,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

Pada Triwulan I Tahun 2026, Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) PBJ yang diumumkan pada SIRUP di lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kendari menunjukkan kinerja yang sangat baik. Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Triwulan I sebesar 77% telah terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan.

Capaian tersebut sejalan dengan Nota Dinas Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Nomor 283/SJ.7/PL.410/IV/2026 tanggal 7 April 2026 tentang Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun Anggaran 2026.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pengadaan barang dan jasa di Stasiun PPMHKP Kendari telah dilaksanakan secara tepat waktu, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama pelaksanaan kegiatan, tidak terdapat kendala yang signifikan, baik dari aspek perencanaan, koordinasi internal, maupun penggunaan aplikasi SIRUP, sehingga tidak terjadi penurunan kinerja dibandingkan periode sebelumnya.

Sebagai langkah antisipasi untuk menjaga konsistensi capaian, Stasiun PPMHKP Kendari telah memastikan seluruh paket pengadaan direncanakan dan diumumkan sejak awal tahun anggaran.

Pelaksanaan pengumuman RUP PBJ pada SIRUP Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya, khususnya dari sisi anggaran dan sumber daya manusia. Efisiensi ini tercapai karena:

1. Kegiatan bersifat administratif dan berbasis sistem, sehingga tidak memerlukan biaya operasional yang besar.
2. Optimalisasi peran pejabat pengadaan dan perencana, yang telah memahami prosedur dan jadwal pengumuman RUP.
3. Pemanfaatan aplikasi SIRUP secara maksimal, sehingga proses perencanaan dan pengumuman RUP dapat dilakukan secara cepat dan akurat tanpa tambahan biaya.

Dengan penggunaan sumber daya yang minimal, Stasiun PPMHKP Kendari mampu mencapai capaian kinerja maksimal dan melampaui target yang ditetapkan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja IKU RUP PBJ pada triwulan berikutnya, Stasiun PPMHKP Kendari telah dan akan melakukan beberapa upaya perbaikan, antara lain:

1. Menjaga konsistensi perencanaan pengadaan sejak awal tahun anggaran, agar pengumuman RUP dapat dilakukan tepat waktu.
2. Meningkatkan koordinasi internal antara perencana, pejabat pengadaan, dan pengelola keuangan.
3. Melakukan pemutakhiran data RUP secara berkala, apabila terdapat perubahan kebutuhan atau kebijakan pengadaan.
4. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi PBJ yang berlaku, guna mendukung transparansi dan akuntabilitas pengadaan.

Dengan upaya tersebut, diharapkan capaian kinerja IKU Persentase RUP PBJ yang diumumkan pada SIRUP di lingkup Stasiun PPMHKP Kendari dapat terus dipertahankan pada level optimal serta mendukung tata kelola pengadaan barang dan jasa yang efektif dan akuntabel.

Untuk perbandingan target dan realisasi IKU serta renstra 2025-2029 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 5 Target dan Realisasi Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kendari

Realisasi Tahun 2025		Tahun 2026							Renstra 2025-2029		
TW I	2025	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW IV	Target PK 2026	% Realisasi thd Target PK	Target 2025	Target 2026	% Capaian thd Target
76	100	0	77	100	120	0	77	100	76	77	100

3. Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik IKM (e-survey IKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: https://ptsp.kkp.go.id/IKM/login Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

Pengukuran:

Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: **IKM unit pelayanan x 25**

Pada Triwulan I tahun 2026 Stasiun PPMHKP Kendari Nilai IKM adalah 3,71 atau 106% dari Target 3,5 sehingga tercapai

Output dari kegiatan ini terdiri dari:

Nilai IKM adalah 3,71 atau 106% target tercapai

Untuk melaksanakan kegiatan ini sumber dana disesuaikan dengan kebutuhan karena masih terdapat blokir efisiensi anggaran kebijakan pemerintah pusat.

37	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	3,62	3,81	3,76	3,71	3,67	3,81	3,71	3,71	3,62	3,71	92,86	A	Sangat Baik	21	Online
38	Stasiun PPMHKP Mamuju	3,77	3,69	3,69	3,69	3,69	3,77	3,62	3,77	3,69	3,71	92,74	A	Sangat Baik	13	Online
39	Stasiun PPMHKP Kendari	3,81	3,75	3,69	3,66	3,78	3,53	3,72	3,69	3,72	3,70	92,62	A	Sangat Baik	32	Online
40	Stasiun PPMHKP Batam	3,69	3,66	3,69	3,86	3,66	3,55	3,59	3,72	3,62	3,67	91,76	A	Sangat Baik	29	Online
41	Balai PPMHKP Semarang	3,67	3,62	3,65	3,67	3,64	3,53	3,58	3,71	3,68	3,64	91,06	A	Sangat Baik	101	Online
42	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	3,67	3,63	3,62	3,69	3,63	3,53	3,59	3,65	3,63	3,63	90,71	A	Sangat Baik	133	Online
43	Stasiun PPMHKP Jambi	3,67	3,67	3,53	3,67	3,47	3,60	3,60	3,67	3,60	3,61	90,19	A	Sangat Baik	15	Online
44	Pusat Manajemen Mutu	3,65	3,55	3,50	3,65	3,55	3,60	3,60	3,60	3,55	3,58	89,58	A	Sangat Baik	20	Online
45	Balai PPMHKP Lampung	3,73	3,65	3,57	3,59	3,54	3,43	3,43	3,68	3,51	3,57	89,26	A	Sangat Baik	37	Online
46	Balai Uji Standar PPMHKP Jakarta	3,68	3,59	3,38	3,59	3,54	3,41	3,51	3,59	3,54	3,54	88,44	A	Sangat Baik	37	Online

Pada Triwulan I Tahun 2026, Indikator Kinerja Utama (IKU) IKM pada UPT Stasiun PPMHKP Kendari menunjukkan kinerja yang sangat baik. Nilai IKM yang diperoleh sebesar 3,71 atau setara dengan 106% dari target, sebagaimana tertuang dalam Surat Sekretaris BPPMHKP Nomor 1066/BPPMHKP.1/HM.450/IV/2026 tanggal 10 April 2026 tentang Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026.

Capaian tersebut mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Stasiun PPMHKP Kendari, baik dari aspek kejelasan prosedur, kecepatan pelayanan, kompetensi petugas, maupun

kepastian biaya dan waktu layanan. Secara umum, tidak terdapat penurunan kinerja dibandingkan periode sebelumnya, dan hasil yang diperoleh menunjukkan konsistensi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keberhasilan ini didukung oleh penerapan standar pelayanan yang jelas, komitmen petugas layanan, serta mekanisme pengaduan dan umpan balik masyarakat yang berjalan dengan baik. Meskipun demikian, Stasiun PPMHKP Kendari tetap melakukan evaluasi terhadap unsur pelayanan yang masih perlu ditingkatkan agar capaian kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada triwulan berikutnya.

Sebagai alternatif solusi atas potensi penurunan kepuasan, telah dilakukan tindak lanjut terhadap masukan dan saran dari responden IKM, khususnya terkait peningkatan kenyamanan sarana layanan dan kecepatan respon petugas.

Pelaksanaan IKM pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia. Hal ini tercapai melalui:

1. Pemanfaatan metode survei berbasis sistem/aplikasi, sehingga tidak memerlukan biaya cetak dan distribusi kuesioner.
2. Optimalisasi peran petugas pelayanan, yang secara langsung mendampingi masyarakat dalam pengisian survei tanpa menambah beban biaya operasional.
3. Penggunaan anggaran yang minimal dan tepat sasaran, disesuaikan dengan kebijakan efisiensi pemerintah pusat.

Dengan sumber daya yang terbatas, Stasiun PPMHKP Kendari tetap mampu memperoleh hasil IKM yang valid dan representatif serta mencapai target kinerja secara optimal.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian IKU IKM pada triwulan berikutnya, Stasiun PPMHKP Kendari telah dan akan melakukan beberapa upaya perbaikan, antara lain:

1. Menindaklanjuti hasil IKM secara berkelanjutan, terutama pada unsur pelayanan yang masih memiliki nilai relatif lebih rendah.
2. Meningkatkan kompetensi dan sikap pelayanan petugas, melalui pembinaan dan penguatan budaya pelayanan prima.
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan, guna mendukung kenyamanan dan kemudahan masyarakat.

4. Memperkuat mekanisme pengaduan dan umpan balik, agar keluhan masyarakat dapat ditangani secara cepat dan tepat.

Dengan upaya tersebut, diharapkan nilai IKM Stasiun PPMHKP Kendari pada tahun 2026 dapat terus meningkat dan mencerminkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Untuk perbandingan target dan realisasi IKU serta renstra 2025-2029 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 6 Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup

Realisasi Tahun 2025		Tahun 2026							Renstra 2025-2029		
TW I	2025	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2026	Target PK 2026	% Realisasi thd Target PK	Target 2025	Target 2026	% Capaian thd Target
86,69	88	86,69	3,5	3,71	106	0	3,5	3,71	88	3,71	106

2.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Stasiun PPMHKP Kendari pada tahun anggaran (TA) 2026 adalah Rp **4.032.282.000**,-. Realisasi penyerapan anggaran Stasiun PPMHKP Kendari pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp **873.047.159**,- atau sebesar **21.65%**. Rekapitulasi penyerapan anggaran Stasiun PPMHKP Kendari T.A 2026 berdasarkan jenis belanja dan jenis kegiatan disajikan pada Tabel 2.11 dan Tabel 2.12

Tabel 2. 7 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada Triwulan I Tahun 2026

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	3.150.139.000	733.585.424	23.29
Belanja Barang	882.143.000	139.461.735	15.81
Belanja Modal	0	0	0
TOTAL	**4.032.282.000**	**873.047.159**	**21.65**

Tabel 2. 8 Penyerapan Anggaran per Jenis Kegiatan pada Triwulan I Tahun 2026

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pengendalian Mutu	178.646.000	12.415.000	6,95
Manajemen Mutu	80.500.000	0	0
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	3.773.136.000	860.632.159	22.81
TOTAL	**4.032.282.000**	**873.047.159**	**21.65**

BAB III
PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja Triwulan I tahun 2026, SPPMHKP Kendari telah melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada program untuk mencapai sasaran, sesuai dengan pengukuran kinerja terlihat bahwa target-target dari sasaran yang ingin dicapai pada Triwulan I, secara umum tercapai.

Nilai capaian kinerja IKU dan IK Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kendari pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 112,74%.

Dari 11 indikator kinerja (11 IKU dan 3 Sasaran Kegiatan), pada Triwulan I Tahun 2026 terdapat 5 indikator kinerja (112,74%) (Istimewa) yang pencapaiannya memenuhi atau melebihi target dan tidak terdapat IKU yang belum tercapai.

Demikian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja di lingkup SPPMHKP Kendari dan data dukung pengukuran kinerja di BPPMHKP.

LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Perjanjian Kinerja Stasiun PPMHKP Kendari Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (%)	72
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (%)	71
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Kendari	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (Indeks)	82,5
		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (Nilai)	77
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (Nilai)	86,2
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (Persen)	86
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (Nilai)	92,1
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (Nilai)	71,75
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (%)	77
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (Indeks)	3.5

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	264.350.000
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	80.500.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan	4.105.238.000
Total Anggaran Stasiun PPMHKP Kendari Tahun 2026		**4.450.088.000**